

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 UNICEF telah berperan dalam mendukung penerapan program pendidikan inklusif yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan di Kabupaten Bone. Provinsi Sulawesi Selatan sendiri merupakan provinsi ke-7 dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dengan populasi sebanyak 8,51 juta jiwa. Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan provinsi ke-9 dengan perekonomian terbesar di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan provinsi dengan perekonomian terbesar pertama di wilayah Indonesia bagian timur.

Provinsi Sulawesi Selatan juga termasuk ke dalam salah satu dari lima provinsi dengan jumlah penyandang disabilitas terbesar di Indonesia selain Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan persentase jumlah penyandang disabilitas sebesar 4% dari total keseluruhan penduduk penyandang disabilitas di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan sudah sejak lama terus berusaha untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas utamanya di bidang pendidikan dengan adanya surat keputusan gubernur sejak tahun 2011 tentang pendidikan inklusif yang kemudian diikuti oleh surat keputusan bupati/walikota dari beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

UNICEF bersama dengan mitra pelaksanaannya Helen Keller Indonesia hadir untuk memberikan dukungan bagi Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Bone untuk melakukan uji coba program pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Tujuan dari dukungan UNICEF tersebut adalah untuk memperkuat peran kelompok kerja pendidikan inklusif di tingkat kabupaten dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar, serta membangun kesadaran dan kapasitas dari para pemangku kepentingan, pihak sekolah, dan para guru.

Program pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar ini dilaksanakan di 62 sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bone, dengan 75% melibatkan sekolah negeri dan 25% sisanya melibatkan madrasah. Program pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar ini berjalan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan telah berhasil menghasilkan beberapa pencapaian, yaitu:

1. Pelatihan yang diberikan bagi para pelatih (*training of trainer*) telah menghasilkan fasilitator sebanyak 18 orang pelatih, yang mana jumlah tersebut dibagi untuk tingkat provinsi sebanyak 4 pelatih dan 14 pelatih sisanya untuk tingkat kabupaten.
2. Sebanyak 619 orang guru telah mendapatkan pelayihan pendidikan inklusif, sehingga mereka telah mampu untuk:
 - a. mengidentifikasi jenis disabilitas berdasarkan jenis hambatan, jumlah hambatan, dan tingkat hambatan disabilitas yang disandang;
 - b. menguasai ruang kelas di mana para siswa penyandang disabilitas menempuh pembelajaran;
 - c. serta mengembangkan praktik pengajaran yang tepat sasaran.
3. Sebanyak lebih dari 22.500 siswa, yang mana 48,3% di antaranya telah memperoleh manfaat dari penggunaan metode belajar inklusif sehingga para peserta didik penyandang disabilitas dapat ikut serta secara aktif di dalam kegiatan belajar mengajar, olahraga, dan sosial seperti:
 - a. Pembelajaran adaptif untuk anak penyandang disabilitas;
 - b. Penggunaan alat bantu pembelajaran khusus;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana ramah disabilitas yang dapat memfasilitasi para penyandang disabilitas.
4. Sebanyak 549 peserta didik penyandang disabilitas yang telah berhasil diidentifikasi oleh para guru yang berada di 66 sekolah berada di lingkungan yang inklusif dengan adanya kebijakan dari sekolah dan pengembangan praktik yang inklusif.
5. Kelompok kerja telah berhasil menghasilkan strategi komprehensif untuk periode empat tahun terhitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Strategi yang komprehensif tersebut mengatur mengenai koordinasi antar lembaga untuk dapat memastikan kesesuaian dan keefektifan dari kegiatan pelaksanaan program pendidikan inklusif yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun rincian biaya yang digunakan selama pelaksanaan uji coba program pendidikan inklusif di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut:

- a. *Training of trainer* menghabiskan biaya sebesar 12 juta rupiah atau sebesar 820 dollar AS untuk setiap satu kali sesi pelatihan.
- b. Pelatihan bagi guru menghabiskan biaya sebesar 12 juta rupiah atau sebesar 820 dollar AS setiap satu kali sesi pelatihan.
- c. Rapat koordinasi kelompok kerja (APBD) yang dilaksanakan menghabiskan biaya sebesar 1 juta rupiah atau sebesar 68 dollar AS setiap satu kali sesi rapat.

Pencapaian yang dihasilkan dari terlaksananya program pendidikan inklusif yang dilakukan di 62 sekolah sasaran di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dan Kabupaten Bone adalah dengan menerapkan modul pelatihan yang didapat oleh para fasilitator dan guru, serta pelaksananya metode pembelajaran inklusif sesuai dengan kurikulum yang berjalan. Atas keberhasilan dari pelaksanaan program pendidikan inklusif di kedua kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, replikasi pelaksanaan program lanjutan dari program pendidikan inklusif tersebut telah dibahas bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan tiga kabupaten terpilih untuk pelaksanaan yaitu di Kabupaten Maros, Talakar, dan Bulukumbi sebagai wilayah sasaran untuk program yang akan berjalan di tahun 2021.

Selain dari rencana replikasi pelaksanaan program yang akan dimulai pada tahun 2021 tersebut, UNICEF juga telah berhasil mengeluarkan kerangka kebijakan dan strategi disabilitas inklusif yaitu *Disability Inclusion Policy And Strategy* *Disability Inclusion Policy And Strategy 2022-2030* (DIPAS) yang merupakan landasan dari UNICEF Strategic Plan 2022-2025 yang akan memberikan pengarahannya terhadap program-program kerja UNICEF yang lebih condong ke arah inklusi disabilitas. DIPAS ini sendiri menekankan prioritas UNICEF terhadap anak-anak penyandang disabilitas dan memberikan strategi dan pengarahannya serta kerangka kerja untuk mempercepat program-program disabilitas inklusif yang sejalan dengan agenda SDGs 2030.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai peran UNICEF terkait pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, penulis menyarankan agar menyertakan capaian pendidikan pada tingkatan yang ingin di bahas di periode yang selanjutnya yang juga mencakup kerangka kebijakan UNICEF yang baru yaitu DIPAS yang mana kerangka kebijakan tersebut memang sudah terfokus dan bertujuan utama untuk mencapai disabilitas inklusif. Adapun jika fokus kajiannya masih sama yaitu di Sulawesi Selatan, penulis juga menyarankan untuk mengkaji replikasi program pendidikan inklusif yang telah berhasil diuji coba pada periode 2018-2020 ini pada periode mulai tahun 2021 tetapi di wilayah kabupaten yang berbeda.

Namun jika pada penelitian selanjutnya masih tetap dengan fokus kajian yang sama dengan penelitian ini, ada baiknya menelaah mengenai hasil implementasi lanjutan paska program ini selesai dilaksanakan untuk melihat apakah persentase keberhasilan dan pencapaian yang idraih sebelumnya meningkat atau justru menurun serta melihat faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat persentase tersebut.

5.2.2 Saran Praktis

Dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, Indonesia tidak bisa hanya bergantung dari sekolah luar biasa (SLB) yang memang ditujukan untuk secara khusus memberikan akses layanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Sebab jika hanya bergantung pada SLB saja, anak-anak penyandang disabilitas akan semakin merasa termarginalisasi dan kesulitan untuk dapat hidup bermasyarakat secara normal dewasa nanti. Oleh karena itu, pendidikan inklusif sangatlah dibutuhkan, bukan hanya untuk mengakomodasi penyandang disabilitas, melainkan juga bagi para peserta didik non-PD lainnya, para guru, pihak sekolah, dan para pemangku kepentingan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Maka dari itu, sudah selayaknya pemerintah baik pusat maupun daerah semakin gencar lagi untuk terus menciptakan program-program baru yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan inklusif dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas di bidang pendidikan bukan hanya tingkat pendidikan dasar tetapi sampai ke pendidikan tinggi. Tentunya hal tersebut tidak dapat dicapai oleh kerja keras pemerintah semata, melainkan dibutuhkan kontribusi aktif dari

masyarakat dan juga organisasi maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya baik dalam tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional.